

Jejak Historis Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia dalam Lintasan Sejarah

Sinta Bella^{1*}, M. Ferry Irawan², Shaleh³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email: 22204082025@student.uin-suka.ac.id¹, 22204082018@student.uin-suka.ac.id²,
shaleh@uin-suka.ac.id³,

DOI: 10.38073/jimpi.v3i1.1599

Received: January 2024

Accepted: January 2024

Published: January 2024

Abstract :

Education in Indonesia has experienced various changes, in the form of policies or laws. Islamic education is an important part of Indonesia's journey to independence. Issues regarding the legality and role of religion in the national education system are then recognized and can be applied at every level of education. This article aims to understand the history and system of Islamic education since independence, the new order and the reform era. This article is library education in Indonesia has experienced various changes, in the form of policies or laws, Islamic research where the author collects data from various references. The results of this research state the role and position of Islamic education and make the position of religious education (including Islamic education) an integral part of the national education system. This law as the starting point for the revival of Islamic education within the framework of equal education policies.

Keywords: *Islamic Education Policy, Historical Traces, History of Islamic Education*

Abstrak :

Pendidikan di Indonesia telah mengalami berbagai macam perubahan, yang berupa kebijakan ataupun undang-undang. Pendidikan Islam menjadi bagian penting dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia. Permasalahan mengenai legalitas dan peran agama dalam sistem pendidikan nasional yang kemudian diakui dan dapat diterapkan pada setiap jenjang pendidikan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui historis dan sistem pendidikan Islam sejak kemerdekaan, orde baru, dan era reformasi. Tulisan ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dimana penulis mengumpulkan data dari berbagai referensi. Hasil dari penelitian ini menyebutkan peran dan kedudukan pendidikan Islam serta menjadikan posisi pendidikan agama (termasuk pendidikan Islam) sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Undang-undang tersebut dinilai sebagai titik awal kebangkitan pendidikan Islam dalam bingkai kebijakan pendidikan yang berkesetaraan.

Kata Kunci: *Kebijakan Pendidikan Islam, Jejak Historis, Sejarah Pendidikan Islam*

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena melalui pendidikan manusia dapat selamat dari kebodohan. Mengembangkan seluruh aspek kepribadian manusia adalah usaha yang berlangsung sepanjang hidup. Dengan kata lain, pendidikan adalah belajar di mana saja, tidak hanya di sekolah. Pendidikan dapat didefinisikan secara umum sebagai upaya manusia untuk membangun kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat dan kebudayaan mereka. Akibatnya, suatu proses pendidikan terjadi atau berlangsung dalam peradaban suatu masyarakat. Ini adalah cara yang sering digunakan untuk menyatakan bahwa pendidikan telah ada sepanjang peradaban manusia. Pendidikan pada dasarnya adalah upaya manusia untuk mempertahankan hidup. Oleh karena itu, perkembangan manusia akan sejalan dengan perkembangan pendidikan.¹

Sebagai agama mayoritas dari Masyarakat Indonesia, pendidikan Islam harus selalu dikembangkan setiap saat. Pendidikan Islam merupakan proses pembentukan individu berdasarkan ajaran yang di wahyukan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW.² Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia harus dikaitkan dengan perkembangan sejarah negara dari masa penjajahan hingga Reformasi. Pesantren, madrasah, surau, dan lembaga pendidikan Islam lainnya sangat berperan dalam proses pembebasan negara dari belenggu penjajah. Lembaga-lembaga ini menjadi tempat dan simbol perlawanan terhadap penjajah.

Lembaga pendidikan Islam telah memainkan peran penting dalam kemajuan negara, meningkatkan kehidupan umat manusia, dan memberikan dasar pendidikan moral-keagamaan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara sejak kemerdekaan hingga reformasi. Meskipun peran dan kontribusi pendidikan Islam sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia, ada beberapa orang yang berpendapat bahwa kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan Islam tidak sebanding dengan nilainya.

Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia sejatinya sudah dimulai sejak agama Islam masuk ke Indonesia, yaitu sekitar abad ke-12 Masehi. Sebagian besar ahli sejarah setuju bahwa daerah Aceh di pulau Sumatera bagian Utara adalah tempat agama Islam pertama kali masuk. Tidak ada jawaban pasti untuk pertanyaan tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia, seperti kapan dan tahun berapa agama itu masuk ke Indonesia, dan siapa orang pertama yang

¹ Dainuri Dainuri, "Integrasi Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional," *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 1 (24 November 2018): 1-8, <https://doi.org/10.36835/hjsk.v8i1.3297>.

² Rina Priarni dkk., "Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Lama Hingga Orde Baru; Perspektif Sejarah Pendidikan Islam Dan Implikasinya Pada Pendidikan Islam Era Reformasi Di Indonesia," *An-Nafah: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman* 2, no. 2 (7 November 2022): 100-109.

membawa agama itu ke Indonesia.³ Namun pada saat itu wilayah Indonesia tidak sama seperti yang sekarang ini, begitupun dengan sosok yang berwenang dalam menentukan kebijakan terkait Pendidikan Islam. Oleh karena itu, pada tulisan ini dibahas mengenai perkembangan historis dari kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia yang dimulai sejak awal Indonesia merdeka dari penjajah hingga saat ini, yakni masa reformasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan metode yang digunakan dalam mengumpulkan datanya ada metode studi kepustakaan (*library research*). Pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan dilakukan dengan melakukan pencarian data dan informasi yang diperlukan terkait dengan penelitian dimana pada tulisan ini yaitu mengenai kebijakan pendidikan Islam di Indonesia dari berbagai sumber seperti buku, artikel, prosiding, serta karya tulis dan sumber lainnya.⁴ Harapan penulis adalah tulisan hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi orang-orang yang membacanya karena mereka mengolah data melalui empat langkah, yaitu pengumpulan data, pengurangan data, pemindahan data, dan verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Islam di Indonesia Pada Zaman Kemerdekaan

Ketika Proklamasi Kemerdekaan diucapkan pada 17 Agustus 1945, revolusi nasional dimulai. Hal ini menghasilkan kemerdekaan yang sangat diinginkan oleh orang Indonesia. Proklamasi ini membebaskan negara dari penjajahan dan menghasilkan banyak perubahan, terutama dalam bidang pendidikan, yang perlu menyesuaikan diri dengan keadaan baru.

Tujuan pendidikan telah berubah pada era ini. Tujuan pendidikan pada satu waktu di bawah pemerintahan Belanda adalah untuk menciptakan kelas elit dan memobilisasi tenaga kerja murah. Kemudian di bawah pemerintahan Jepang, tujuan pendidikan adalah untuk menciptakan tenaga kerja dan memobilisasi militer. Namun, setelah kemerdekaan pada tahun 1946, SK Menteri PP dan Kebijakan mengarahkan pendidikan untuk memupuk patriotisme. Instruksi umum dari Menteri Pengajaran pertama, Ki Hajar Dewantara, mengarahkan semua sekolah dan guru untuk:

1. Mengibarkan “Sang Merah Putih” setiap hari di halaman sekolah.
2. Menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya”
3. Menghentikan pengibaran bendera Jepang dan nyanyian “Kimigayo”

³ Priarni dkk.

⁴ Khatibah Khatibah, “Penelitian kepustakaan,” *Iqra’: Jurnal Perpustakaan dan Informasi* 5, no. 01 (2011): 36–39; Hardani Hardani dkk., *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020).

4. Menghapuskan pelajaran bahasa Jepang dan segala upacara yang berasal dari Balatentara Jepang.
5. Memberikan semangat nasionalisme kepada semua murid.⁵

Pendidikan Islam telah mengalami perjalanan yang panjang sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, meskipun telah ada sejak sebelum Indonesia merdeka. Pada awal kemerdekaan, pentingnya pendidikan Islam semakin terlihat karena pemerintah mengakui, melindungi, dan mengembangkannya, sesuai dengan ketentuan UUD 1945 Pasal 31 yang menegaskan hak setiap warga negara untuk mendapat pendidikan dan tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan sistem pendidikan nasional.⁶

Pendidikan Islam dianggap sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Dalam rapat BPKNIP pada tanggal 22 Desember 1945, disepakati untuk mendorong perkembangan pendidikan dengan mendorong pertumbuhan pesantren dan madrasah. Keputusan tersebut kemudian diikuti oleh keputusan BPKNIP untuk memberikan dukungan dan perhatian pemerintah kepada madrasah-madrasah tersebut.⁷

Perkembangan pendidikan Islam pada masa ini erat-terkait dengan peran Departemen Agama yang secara intensif memperjuangkan politik pendidikan Islam. Orientasi Departemen Agama dalam bidang pendidikan Islam berdasarkan aspirasi umat Islam adalah agar pendidikan agama diajarkan di sekolah-sekolah di samping pengembangan madrasah itu sendiri. Kebijakan pendidikan Islam semakin signifikan sejak Departemen Agama mendapat tanggung jawab membina dan pengembangan pendidikan agama di lembaga-lembaga pendidikan.⁸

Ki Hadjar Dewantara, sebagai Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PP&K) pertama, menyatakan bahwa pendidikan agama harus dilaksanakan di sekolah-sekolah negeri. Namun, pada rapat tanggal 27 Desember 1945, Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) mengusulkan kepada Kementerian PP&K, yang saat itu dipimpin oleh Ki Hadjar Dewantara, untuk melakukan pembaharuan dalam pendidikan dan pengajaran di Indonesia sesuai dengan rencana pokok usaha pendidikan dan pengajaran. Usulan tersebut mencakup masalah pengajaran agama, madrasah, dan pondok pesantren. Namun, implementasi usulan BP-KNIP ini baru bisa dilakukan pada masa kepemimpinan MR. Suwandi di Kementerian PP&K sekitar tahun 1946

⁵ Abdul Miud Aris Shofa, "Sejarah Panjang Pendidikan Karakter di Indonesia Pada Era Proklamasi Kemerdekaan Sampai Era Reformasi," *Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (23 April 2020): 73-90, <https://doi.org/10.29100/jr.v6i1.1660>.

⁶ Sejarah Peradaban Islam, "Sejarah Pendidikan Islam," *Inovasi*. Diakses dari <https://raulina.wordpress.com/2009/12/30/m>, 1984.

⁷ Machnun Husein, *Pendidikan Islam dalam lintasan sejarah* (Nur Cahaya, 1983).

⁸ Islam, "Sejarah Pendidikan Islam."

hingga 1947 karena adanya ketidakstabilan pemerintahan yang baru dan pergantian kabinet yang sering terjadi.

Dalam upaya reformasi, pemerintah membentuk panitia dan menerbitkan Surat Keputusan Menteri PP&K, No. 104, pada tanggal 1 Maret 1946. Salah satu tugasnya yang terkait dengan pendidikan agama (Islam) adalah: (a) Menyediakan pelajaran agama di semua sekolah dalam jam pelajaran dan mulai diajarkan di Sekolah Rakyat (SR) dari kelas IV, (b) Mengatur guru agama yang disediakan oleh Kementerian Agama dan dibayar oleh Pemerintah, (c) Menyatakan bahwa guru agama harus memiliki pengetahuan umum, (d) Menekankan pentingnya peningkatan pesantren dan madrasah.

Selanjutnya, pendidikan Islam mulai diakui keberadaannya ketika Tap MPRS No. 2 tahun 1960 menegaskan perlunya memberikan pelajaran agama di semua jenjang pendidikan, dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi Negeri, serta mengakui Pesantren dan Madrasah sebagai lembaga pendidikan otonom di bawah pembinaan Departemen Agama.

Pendidikan Islam Pada Era Orde Baru

Perkembangan Islam pada masa Orde Baru berkembang dengan pesat, begitu juga dengan perkembangan agama lain. Saking bebasnya, muncullah kristenisasi dengan bentuk bakti sosial terhadap umat muslim yang membutuhkan bantuan. Dibalik itu, para misionaris mengajak umat Muslim untuk masuk agama mereka. Akibat dari sikap tersebut, timbul beberapa pemberontakan dengan memusnahkan gereja-gereja yang dibangun di tengah pemukiman umat Islam. Pengajaran Islam berkembang dengan munculnya beberapa program pendidikan Islam, antara lain adanya program pelatihan bahasa Arab yang disiarkan di TVRI, didirikannya MUI, didirikannya MAN PK, program penyebaran da'i, dan lain-lain.⁹

Beberapa kebijakan pendidikan Islam era Orde Baru mengakibatkan perubahan dalam pendidikan Islam. Misalnya, lahirnya SKB Tiga Menteri yang memungkinkan lulusan madrasah untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah umum, menyebabkan perlunya keseimbangan antara kurikulum madrasah dan kurikulum sekolah umum. Pada masa tersebut, pendidikan agama menjadi mata pelajaran yang wajib diajarkan mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga universitas.¹⁰

Pada era pemerintahan Orde Baru, pendidikan dipengaruhi oleh politik sentralistik, fokusnya adalah pada pembangunan ekonomi yang didukung oleh stabilitas politik dan keamanan, serta dukungan dari birokrasi pemerintah, angkatan bersenjata, dan konglomerat. Secara ideologis, pendidikan telah

⁹ Heni Yuningsih, "Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Baru," *Tasyri'* 22, no. 2 (1 Oktober 2015): 175-94.

¹⁰ Yuningsih.

ditekankan oleh para pendiri bangsa, seperti yang tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 yang mengutamakan pendidikan sebagai prioritas utama. Sebelum masa pemerintahan Presiden Suharto, elit politik juga memberi perhatian pada masalah pendidikan nasional, dengan tokoh seperti proklamator Bung Hatta yang aktif memperjuangkan kemajuan pendidikan sejak zaman kolonialisme. Namun, kebijakan pendidikan pada masa Orde Baru cenderung menuju sistem doktrinasi, yang memaksakan paham-paham rezim tersebut pada masyarakat, mulai dari tingkat Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi melalui program penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Pendekatan ini bukan hanya menanamkan ideologi Orde Baru, tetapi juga menolak pengaruh budaya asing baik yang dianggap positif maupun negatif. Dengan demikian, pendidikan pada masa itu lebih mengedepankan orientasi politik untuk memastikan ketaatan rakyat pada pemerintah daripada meningkatkan kualitas kehidupan atau sumber daya manusia Indonesia. Sistem pendidikan ini juga menekankan militerisme sesuai dengan suasana perang dingin pada masanya, dengan pendekatan yang otoriter dan kurang memberikan kebebasan berpikir.¹¹

Pendidikan merupakan fondasi utama bagi kemajuan suatu bangsa, dengan tujuan merancang masa depan manusia sebagai generasi yang memajukan negara. Dalam implementasinya, pendidikan di Indonesia dipengaruhi oleh faktor politik dan kebijakan pemerintah. Semangat pada masa Orde Baru awalnya adalah semangat perlawanan, namun kemudian melemah secara bertahap dan menjadi tidak aktif sama sekali. Generasi baru, terutama mahasiswa, menolak pandangan rezim Orde Baru dan mengambil sikap melawan, meneruskan semangat para perintis kemerdekaan dalam menentang segala bentuk ketidakadilan.¹²

Pemerintah mulai menyadari reaksi keras umat Islam dan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah. Sebagai tanggapan terhadap kekhawatiran umat Islam akan kehilangan sistem pendidikan madrasah, pada tanggal 24 Maret 1975, dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri.¹³

SKB tersebut menciptakan solusi yang mengakui keberadaan madrasah dan memastikan kelangsungan upaya menuju pembentukan sistem pendidikan nasional yang menyeluruh. Dalam kebijakan tersebut, diakui bahwa terdapat

¹¹ Evi Fatimatur Rusydiyah, "Analisis Historis Kebijakan Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Masa KH. A. Wahid Hasyim," *Al-Ibrah : Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam* 2, no. 1 (30 Juni 2017): 1-31.

¹² M. Syahrani Jailani dan Muhammad Muhammad, "Kilas Balik Kebijakan Pendidikan Islam Indonesia Pada Masa Orde Baru (1967-1997)," *INNOVATIO: Journal for Religious Innovations Studies* 19, no. 1 (30 Juni 2019): 15-26, <https://doi.org/10.30631/innovatio.v19i1.75>.

¹³ Heru Prasetyo dan Afifah Zulfa Destiyanti, "Analisis Historis Pendidikan Islam Sejak Kemerdekaan, Orde Baru, Era Reformasi Hingga Sekarang (Zonasi & Full Day School)," *Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian, Dan Inovasi* 3, no. 5 (10 Januari 2023), <https://doi.org/10.59818/jpi.v3i1.411>.

tiga tingkatan madrasah, yaitu Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah, yang ijazahnya setara dengan tingkat SD, SMP, dan SMA. Selain itu, lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum yang lebih tinggi, dan siswa juga memiliki opsi untuk pindah ke sekolah umum dengan tingkat yang setara.

Makna dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri bagi komunitas Islam mencakup dua aspek penting. Pertama, meningkatnya kesempatan bagi siswa-siswa madrasah untuk meraih mobilitas sosial dan vertikal yang sebelumnya terbatas di institusi tradisional. Kedua, membuka pintu bagi para santri untuk memasuki sektor pekerjaan modern. Meskipun demikian, SKB Tiga Menteri tidaklah tanpa tantangan. Dengan menyamakan status madrasah dengan sekolah lain, kurikulum madrasah kini mengalami perubahan dengan 70% materi pelajaran umum dan 30% materi pelajaran agama. Hal ini menimbulkan beban tambahan bagi madrasah, dimana mereka harus meningkatkan mutu pendidikan umum sesuai standar sekolah sambil tetap menjaga kualitas pendidikan agama yang baik.¹⁴

Pendidikan Islam Pada Era Reformasi

Adapun keadaan pendidikan islam dizaman era reformasi dapat dikemukakan sebagai berikut:¹⁵

Pertama, kebijakan untuk memperkuat pendidikan Islam sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional diimplementasikan dengan menyempurnakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Perubahan tersebut melibatkan inklusi pesantren, ma'had Ali, Raudhatul Athfal (Taman Kanak-Kanak), dan majelis taklim ke dalam sistem pendidikan nasional, bukan hanya madrasah seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang sebelumnya. Hal ini tidak hanya mengakui pentingnya peran pendidikan Islam, tetapi juga mengurangi kesan diskriminasi dan pemisahan. Selain itu, berbagai peraturan turunan seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Guru dan Dosen, tidak hanya mengatur aspek pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Nasional, tetapi juga di bawah Kementerian Agama.¹⁶

Kedua, Kebijakan meningkatkan alokasi dana untuk pendidikan Islam

¹⁴ Eva Tri Cahyanti, "Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia: Masa Kolonial Hingga Masa Reformasi," *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 2, no. 2 (11 Agustus 2021): 181-97, <https://doi.org/10.62775/edukasia.v2i2.47>.

¹⁵ Afiful Ikhwan, "Kajian Sosio-Historis Pendidikan Islam Indonesia Era Reformasi," *EDUKASI: Jurnal Pendidikan Islam (e-Journal)* 5, no. 1 (2 Juni 2017): 14-32.

¹⁶ Sarno Hanipudin, "Pendidikan Islam di Indonesia dari Masa ke Masa," *Matan: Journal of Islam and Muslim Society* 1, no. 1 (26 Oktober 2019): 39-53, <https://doi.org/10.20884/1.matan.2019.1.1.2037>.

terlihat dari alokasi 20% dari APBN untuk berbagai keperluan pendidikan seperti gaji guru, operasional, beasiswa, buku gratis, infrastruktur, dan pengembangan SDM, yang telah menghasilkan kemajuan yang signifikan dalam dunia pendidikan, termasuk pendidikan Islam.

Ketiga, wajib bagi setiap anak Indonesia untuk mengenyam pendidikan selama sembilan tahun, minimal sampai menyelesaikan SMP atau Tsanawiyah. Pemerintah menerapkan kebijakan sekolah gratis untuk mendukung pelaksanaan wajib belajar bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Ini berarti mereka tidak dikenakan biaya operasional pendidikan karena sekolah yang menyediakan pendidikan gratis tersebut telah mendapat bantuan operasional sekolah yang disebut BOS.

Keempat, implementasi sekolah dengan standar nasional (SBN) dan internasional (SBI) mencakup seluruh aspek pendidikan, termasuk visi, misi, tujuan, kurikulum, metode pengajaran, fasilitas, manajemen, evaluasi, dan lainnya, yang harus memenuhi kriteria nasional dan internasional. Untuk memastikan hal ini, pemerintah melakukan evaluasi terhadap lembaga pendidikan yang layak untuk mendapatkan status SBN dan SBI. Dalam upaya ini, Kementerian Pendidikan Nasional menugaskan direktorat peningkatan mutu pendidikan.

Kelima, kebijakan sertifikasi guru dan dosen berlaku bagi seluruh tenaga pengajar, termasuk yang bekerja di lembaga pendidikan negeri dan swasta, serta termasuk guru umum dan agama di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama. Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas tenaga pengajar sebagai profesional dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Guru dan Dosen diterbitkan untuk mendukung implementasi kebijakan ini.

Keenam, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi (KBK/tahun 2004) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP/tahun 2006) memperkenalkan pendekatan di mana peserta didik tidak hanya diminta untuk menguasai materi pelajaran seperti pada kurikulum 1999, tetapi juga diharapkan memiliki pengalaman langsung dalam proses pembelajaran, seperti membaca, memahami, menyimpulkan, mengumpulkan data, mendiskusikan, menjawab pertanyaan, melaksanakan tugas, memecahkan masalah, dan melakukan analisis.

Ketujuh, Pengembangan pendekatan pembelajaran yang menekankan peran murid dalam belajar dan meneliti, serta mengadopsi suasana partisipatif, inovatif, aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.

Kedelapan, Penerapan manajemen yang berfokus pada pemberian pelayanan yang baik dan memuaskan kepada semua pelanggan, sesuai dengan konsep *Total Quality Management* (TQM), menjadi penting. Dalam konteks ini, di

era Reformasi telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), yang mencakup: (a) Standar isi (kurikulum), (b) Standar mutu lulusan, (c) Standar proses pembelajaran, (d) Standar pendidikan dan tenaga kependidikan, (e) Standar pengelolaan, (f) Standar sarana prasarana, (g) Standar pembiayaan, (h) Standar penilaian¹⁷

Kesembilan, kebijakan mengubah nama dan karakteristik madrasah menjadi sekolah umum dengan orientasi keagamaan yang khas. Dengan karakteristik ini, madrasah menjadi lebih dari sekadar sekolah umum, karena di dalamnya siswa tidak hanya mendapatkan pelajaran umum seperti di SD, SMP, dan SMA, tetapi juga pendidikan keagamaan. Meskipun demikian, perlu diakui bahwa banyak madrasah yang masih memiliki kekurangan dan masalah, seperti halnya sekolah umum. Dengan diterapkannya kebijakan ini, tidaklah tidak mungkin bahwa suatu hari nanti madrasah akan menjadi pilihan utama masyarakat.

Sepanjang masa awal kemerdekaan hingga masa reformasi sekarang ini, pendidikan Islam merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional, sehingga kebijakan pendidikan Islam sangat bergantung pada kebijakan pendidikan nasional. Oleh karena itu, ahli pendidikan Islam harus berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan. Pendidikan Islam selalu mengalami perkembangan dari zaman ke zaman. Corak pendidikan Islam pada masa itu sangat dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat dan kondisi negara. Pada masa kemerdekaan, pendidikan Indonesia mengalami transformasi besar setelah Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Di masa lalu, tujuan pendidikan adalah untuk menciptakan kelas elit atau tenaga kerja, tetapi setelah kemerdekaan, tujuan pendidikan beralih untuk memupuk patriotisme dan mengakui pentingnya pendidikan Islam sebagai bagian penting dari sistem pendidikan nasional. Perkembangan pendidikan Islam dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang semakin mengakui pesantren dan madrasah sebagai institusi pendidikan otonom dan peran Departemen Agama yang semakin kuat dalam mendukung kebijakan pendidikan Islam.

Di zaman orde baru pendidikan yang semakin berkembang pesat, banyak konten pendidikan ditampilkan di media, termasuk televisi. Pada saat yang sama, pada tanggal 24 Maret 1975, Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 03 Tahun 1975 antara Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri) dikeluarkan. Namun, politik sentralistik sekarang memengaruhi pendidikan, dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh stabilitas politik dan keamanan yang didukung oleh birokrasi pemerintah, angkatan bersenjata, dan

¹⁷ Presiden Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan" (2005).

konglomerat. Semangat zaman masih mengabdikan kepada penguasa. Pendidikan Islam mendapatkan perhatian yang sangat besar dari pemerintah hingga akhirnya di masa reformasi. Di era reformasi, pendidikan Islam telah berintegrasi dengan dunia internasional untuk membantu pembangunan bangsa dan negara.

KESIMPULAN

Pendidikan Islam menjadi bagian dari pendidikan nasional maka kebijakan pendidikan Islam sangat tergantung kepada kebijakan pendidikan nasional sehingga para pakar pendidikan Islam hendaknya turut serta dalam proses pengambilan kebijakan pendidikan. Dari zaman ke zaman pendidikan Islam selalu mengalami perkembangan. Kebutuhan masyarakat dan situasi kenegaraan sangat mempengaruhi corak pendidikan Islam pada zaman tersebut.

Pada zaman kemerdekaan bahwa setelah Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, terjadi perubahan signifikan dalam pendidikan di Indonesia. Dulu, pendidikan ditujukan untuk membentuk kelas elit atau menciptakan tenaga buruh, tetapi setelah kemerdekaan, tujuan pendidikan beralih untuk menanamkan semangat patriotisme dan mengakui pentingnya pendidikan Islam sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Perkembangan pendidikan Islam dipengaruhi oleh peran Departemen Agama yang intensif dalam memperjuangkan politik pendidikan Islam, serta kebijakan pemerintah yang semakin mengakui keberadaan pesantren dan madrasah sebagai lembaga pendidikan otonom.

Di zaman orde baru pendidikan semakin berkembang pesat, banyak konten-konten pendidikan yang termuat di media-media termasuk media televisi. Di zaman ini pula, pada tanggal 24 Maret 1975 dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri) No. 03 Tahun 1975. Namun di masa ini pendidikan diwarnai oleh politik yang bersifat sentralistik, dengan titik tekan pada pembangunan ekonomi yang ditopang oleh stabilitas politik dan keamanan yang didukung oleh kekuatan birokrasi pemerintah, angkatan bersenjata, dan konglomerat. Bahkan semangat zaman di masa ini adalah semangat zaman untuk mengabdikan kepada penguasa.

Hingga akhirnya di masa reformasi pendidikan Islam mendapatkan perhatian yang sangat dari pemerintahan. Pendidikan sudah tidak berkutat keranah nasional saja namun pendidikan Islam di era reformasi sudah berintegrasi dengan dunia internasional guna untuk pembangunan bangsa dan Negara.

DAFTAR PUSTAKA

Cahyanti, Eva Tri. "Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia: Masa Kolonial

- Hingga Masa Reformasi." *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 2, no. 2 (11 Agustus 2021): 181-97. <https://doi.org/10.62775/edukasia.v2i2.47>.
- Dainuri, Dainuri. "Integrasi Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional." *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 1 (24 November 2018): 1-8. <https://doi.org/10.36835/hjsk.v8i1.3297>.
- Hanipudin, Sarno. "Pendidikan Islam di Indonesia dari Masa ke Masa." *Matan: Journal of Islam and Muslim Society* 1, no. 1 (26 Oktober 2019): 39-53. <https://doi.org/10.20884/1.matan.2019.1.1.2037>.
- Hardani, Hardani, Jumari Ustiawaty, Helmina Andriani, ria istiqomah, Dhika Sukmana, Roushandy Fardani, nur auliya, dan Evi Utami. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020.
- Husein, Machnun. *Pendidikan Islam dalam lintasan sejarah*. Nur Cahaya, 1983.
- Ikhwan, Afiful. "Kajian Sosio-Historis Pendidikan Islam Indonesia Era Reformasi." *EDUKASI: Jurnal Pendidikan Islam (e-Journal)* 5, no. 1 (2 Juni 2017): 14-32.
- Islam, Sejarah Peradaban. "Sejarah Pendidikan Islam." *Inovasi*. Diakses dari <https://raulina.wordpress.com/2009/12/30/m>, 1984.
- Jailani, M. Syahran, dan Muhammad Muhammad. "Kilas Balik Kebijakan Pendidikan Islam Indonesia Pada Masa Orde Baru (1967-1997)." *INNOVATIO: Journal for Religious Innovations Studies* 19, no. 1 (30 Juni 2019): 15-26. <https://doi.org/10.30631/innovatio.v19i1.75>.
- Khatibah, Khatibah. "Penelitian kepustakaan." *Iqra': Jurnal Perpustakaan dan Informasi* 5, no. 01 (2011): 36-39.
- Prasetyo, Heru, dan Afifah Zulfa Destiyanti. "Analisis Historis Pendidikan Islam Sejak Kemerdekaan, Orde Baru, Era Reformasi Hingga Sekarang (Zonasi & Full Day School)." *Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian, Dan Inovasi* 3, no. 5 (10 Januari 2023). <https://doi.org/10.59818/jpi.v3i1.411>.
- Presiden Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (2005).
- Priarni, Rina, Ainul Yaqin, Ali Imron, dan Rangga Sa'adillah S.a.p. "Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Lama Hingga Orde Baru; Perspektif Sejarah Pendidikan Islam Dan Implikasinya Pada Pendidikan Islam Era Reformasi Di Indonesia." *An-Nafah: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman* 2, no. 2 (7 November 2022): 100-109.
- Rusydiyah, Evi Fatimatur. "Analisis Historis Kebijakan Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Masa KH. A. Wahid Hasyim." *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam* 2, no. 1 (30 Juni 2017): 1-31.
- Shofa, Abdul Miud Aris. "Sejarah Panjang Pendidikan Karakter di Indonesia Pada Era Proklamasi Kemerdekaan Sampai Era Reformasi." *Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (23 April 2020): 73-90. <https://doi.org/10.29100/jr.v6i1.1660>.
- Yuningsih, Heni. "Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Baru." *Tasyri'* 22, no. 2 (1 Oktober 2015): 175-94.